



Integrasi Nilai Islam dan Pancasila Dalam Pendidikan Tinggi: Analisis Pemikiran Tokoh Islam Indonesia

Nanang Tri Handoko

Universitas Islam Negeri Kiyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

¹nanangtrihandoko12345@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the integration of Islamic values and Pancasila in higher education through the perspectives of Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), and Buya Hamka, and to examine their relevance in strengthening students' character education. The research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from primary and secondary sources, including books, scholarly articles, the works of the three scholars, and other relevant documents. Data were analyzed descriptively and analytically through identification, interpretation, and synthesis of the main concepts concerning the relationship between Islam and Pancasila within the context of higher education. The findings reveal that the three scholars share a common view that Islam and Pancasila are harmonious and complementary value systems in developing Indonesian national life. Nurcholish Madjid emphasized the universality of Islamic values and the acceptance of Pancasila as a national consensus; Gus Dur promoted pluralism, tolerance, democracy, and respect for human rights; while Buya Hamka highlighted the compatibility between the Islamic concept of tawhid and the first principle of Pancasila, as well as the importance of social justice. The integration of these perspectives in higher education can be implemented through curriculum development, character education, inclusive academic culture, and the promotion of religious moderation. This study concludes that the integration of Islamic values and Pancasila provides a strategic foundation for developing students who are religious, moderate, tolerant, and nationally minded, enabling them to address ideological, social, and cultural challenges in the era of globalization.

Keywords: Value integration, Islam, Pancasila, higher education, character education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila dalam pendidikan tinggi melalui pemikiran Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Buya Hamka serta relevansinya dalam penguatan pendidikan karakter mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa buku, artikel ilmiah, karya ketiga tokoh, serta dokumen lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui identifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap konsep-konsep utama mengenai relasi Islam dan Pancasila dalam konteks pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tokoh memiliki pandangan yang sejalan bahwa Islam dan Pancasila merupakan dua sistem nilai yang bersifat harmonis dan saling melengkapi dalam membangun kehidupan berbangsa. Nurcholish Madjid menekankan universalitas nilai Islam dan penerimaan terhadap Pancasila sebagai konsensus nasional, Gus Dur mengedepankan pluralisme, toleransi, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sedangkan Buya Hamka menegaskan keselarasan prinsip tauhid dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta pentingnya keadilan sosial. Integrasi pemikiran ketiga tokoh tersebut dalam pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui penguatan kurikulum, pendidikan karakter, budaya akademik yang inklusif, serta pengembangan moderasi beragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai Islam dan Pancasila merupakan landasan strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang religius, moderat, toleran, dan berwawasan kebangsaan sehingga mampu menghadapi tantangan ideologis, sosial, dan budaya di era global.

Kata Kunci: *Integrasi nilai, Islam, Pancasila, pendidikan tinggi, pendidikan karakter.*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang dalam aspek spiritual, moral, dan sosial. Dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural dan religius, penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar yang mampu menjembatani keberagaman dan memperkuat semangat kebersamaan. Pancasila sebagai dasar negara, dan Islam sebagai agama mayoritas, memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter mahasiswa di perguruan tinggi.

Konsep integrasi antara nilai Islam dan Pancasila dalam pendidikan tinggi bukanlah hal baru, namun aktualisasinya masih menjadi tantangan. Beberapa perguruan tinggi telah memasukkan nilai-nilai religius dan kebangsaan ke dalam kurikulum, namun sering kali pendekatan yang digunakan bersifat parsial. Sebagian institusi menekankan aspek religius tetapi kurang pada aspek kebangsaan, begitu pula sebaliknya.

Sejarah Indonesia mencatat banyak tokoh Muslim yang tidak hanya menjadi panutan dalam kehidupan beragama, tetapi juga peletak fondasi berpikir kebangsaan. Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Buya Hamka adalah tiga di antara mereka yang memandang bahwa Islam dan Pancasila bukan entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat disinergikan dalam membangun Indonesia yang damai dan berkeadaban.

Nurcholish Madjid melalui gagasannya “Islam Yes, Partai Islam No” berupaya mendorong pemahaman Islam yang terbuka terhadap modernitas dan kebangsaan. Ia mengkritik politisasi agama, namun tetap menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam membentuk etika publik dan tatanan sosial yang adil. Pancasila baginya bukan ideologi sekuler, melainkan refleksi dari nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam Islam.¹ Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, menegaskan bahwa pluralisme dan kebebasan beragama adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Ia mendukung penuh Pancasila sebagai dasar negara karena mengandung prinsip-prinsip dasar seperti toleransi, keadilan, dan

¹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 276

kemanusiaan². Gus Dur bahkan memandang Pancasila sebagai jalan tengah yang paling tepat untuk negara majemuk seperti Indonesia.

Buya Hamka juga menyampaikan pandangan senada. Dalam berbagai karyanya, ia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan Pancasila tidak bertolak belakang, bahkan dapat saling menguatkan. Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” ia tafsirkan sebagai pengakuan terhadap prinsip tauhid. Ia juga menegaskan bahwa Islam sangat mendukung keadilan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam sila-sila lainnya.³ Namun demikian, dalam praktiknya, masih sering muncul pandangan yang mempertentangkan keduanya. Beberapa kalangan menganggap bahwa Pancasila adalah produk sekuler Barat, sementara yang lain mencurigai ekspresi nilai-nilai Islam sebagai ancaman terhadap negara. Di sinilah pentingnya pendidikan tinggi untuk menjadi ruang dialog dan integrasi nilai.

Pendidikan tinggi perlu menjadi tempat di mana mahasiswa dikenalkan pada pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia yang progresif, toleran, dan nasionalis. Pemikiran Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka dapat menjadi bahan refleksi untuk membangun narasi integratif yang membumikan nilai Islam dalam bingkai Pancasila. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia seutuhnya.

² Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 213

³ Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 88

Selain itu, integrasi ini juga penting dalam konteks membendung radikalisme dan eksklusivisme agama di kalangan mahasiswa. Kampus harus menjadi ruang inklusif yang mendorong pemikiran terbuka dan toleran, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan tanpa mengabaikan akar spiritualitas dan religiusitas bangsa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali pemikiran ketiga tokoh Islam tersebut dan relevansinya dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia. Dengan pendekatan studi pustaka (library research), penelitian ini akan menganalisis karya-karya, pidato, dan tulisan mereka dalam rangka merumuskan kerangka konseptual integrasi nilai Islam dan Pancasila yang aplikatif di lingkungan perguruan tinggi.

Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi pemikiran Islam dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan akademisi. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.⁴

Dengan mengangkat pemikiran tiga tokoh penting ini, penelitian ini juga berupaya untuk menumbuhkan kembali semangat Islam yang moderat dan nasionalis di lingkungan akademik. Di tengah tantangan ideologis dan krisis identitas,

⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 59

pendidikan tinggi harus hadir sebagai pelopor peradaban dan ruang pembentukan karakter bangsa yang berpijak pada nilai-nilai luhur⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggali dan menganalisis secara mendalam pemikiran tokoh Islam Indonesia, yakni Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka, terkait integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam konteks pendidikan tinggi. Data yang dikaji berupa literatur, buku, artikel ilmiah, karya tulis tokoh, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan gagasan dan pemikiran ketiga tokoh tersebut, khususnya yang membahas hubungan Islam dan Pancasila serta aplikasinya dalam pendidikan. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka secara sistematis dengan fokus pada aspek filosofis, ideologis, dan praktis dari integrasi nilai Islam dan Pancasila di perguruan tinggi.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni menguraikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan konsep-konsep utama yang ditemukan dalam literatur untuk membangun pemahaman komprehensif tentang bagaimana nilai Islam dan

⁵ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Makna dan Tujuan Hidup Beragama* (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 151.

Pancasila dapat diintegrasikan dalam pendidikan tinggi berdasarkan pemikiran tokoh. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi gagasan ketiga tokoh terhadap tantangan dan strategi implementasi nilai-nilai tersebut.

Akhirnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan argumentatif, guna memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai peran pemikiran tokoh Islam Indonesia dalam memperkuat integrasi nilai Islam dan Pancasila di perguruan tinggi. Penelitian ini juga mengkaji implikasi pemikiran tersebut untuk pengembangan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan mahasiswa di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Harmonisasi Nilai Islam dan Pancasila dalam Konteks Kebangsaan

Nilai-nilai Islam dan Pancasila merupakan dua fondasi utama yang membentuk kerangka moral dan ideologis masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki warisan budaya dan spiritual yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai universal yang menjadi pegangan seluruh warga bangsa tanpa memandang latar belakang agama.

Pancasila dirumuskan sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjadi perekat keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan

Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—mengandung nilai-nilai universal yang juga selaras dengan prinsip-prinsip moral agama, termasuk Islam⁶.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengakui eksistensi Tuhan sebagai sumber kebenaran dan keadilan. Konsep ini sejalan dengan aqidah Islam yang menegaskan keesaan Allah (tauhid). Dengan demikian, sila pertama ini menjadi titik temu antara nilai Islam dan Pancasila, menguatkan landasan spiritual dan moral bangsa Indonesia.

Selain itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua juga sangat relevan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial ('adl) dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Islam mendorong umatnya untuk berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan semangat Pancasila dalam menjaga kemanusiaan yang bermartabat⁷.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga mengajak seluruh bangsa untuk bersatu dalam keberagaman. Islam juga mendorong persatuan umat dan menolak segala bentuk perpecahan, sebagaimana terdapat dalam konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) yang bersifat inklusif dan universal. Prinsip ini membantu menjembatani perbedaan suku, ras, dan agama di Indonesia.

⁶ Yudi Latif, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara dan Ideologi Bangsa* (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 75

⁷ Hamka, *Tasawuf Modern: Islam dan Toleransi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 102

Demokrasi dalam sila keempat Pancasila, yang menekankan permusyawaratan dan perwakilan, dapat dipandang selaras dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Musyawarah (syura) merupakan metode pengambilan keputusan yang menghargai pendapat semua pihak dan mengutamakan kebijaksanaan bersama. Oleh karena itu, Pancasila dan Islam memiliki persamaan dalam hal pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan secara adil dan partisipatif.

Nilai keadilan sosial dalam sila kelima menegaskan perlunya pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kesenjangan dalam masyarakat. Islam juga menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar penting dalam tata kehidupan umat, dengan kewajiban zakat, sedekah, dan sistem sosial yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan Masyarakat⁸

Harmonisasi nilai Islam dan Pancasila dapat dilihat sebagai bentuk integrasi ajaran agama dan nilai-nilai kebangsaan dalam membangun kehidupan bernegara yang adil dan harmonis. Pendekatan ini penting untuk menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Namun, perlu dipahami bahwa harmonisasi ini bukan berarti mengaburkan identitas atau prinsip agama. Sebaliknya, integrasi ini menjunjung tinggi keduanya secara proporsional dan saling melengkapi, sehingga nilai-nilai agama menjadi sumber inspirasi moral bagi nilai-nilai kebangsaan yang bersifat universal.

Dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman harmonisasi ini sangat strategis. Perguruan tinggi sebagai lembaga pembentuk

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 134

intelektual dan karakter bangsa harus menanamkan pemahaman bahwa nilai-nilai Islam dan Pancasila bukanlah lawan, melainkan mitra dalam membangun bangsa yang bermoral dan beradab.

Pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka telah memberikan kontribusi besar dalam merumuskan konsep harmonisasi ini. Mereka melihat bahwa Pancasila bukan ideologi sekuler yang memisahkan agama dan negara, tetapi sebuah konsensus moral yang dapat merangkul nilai-nilai Islam sebagai sumber spiritual dan etika bangsa⁹

Selain itu, Gus Dur dengan gagasan pluralismenya menegaskan bahwa Pancasila adalah wadah bagi seluruh agama di Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai dan produktif. Pancasila memberi ruang yang cukup luas bagi praktik keagamaan tanpa mengurangi rasa kebangsaan yang inklusif.

Konsep harmonisasi juga penting untuk menolak paham radikalisme dan eksklusivisme yang mengancam kerukunan nasional. Integrasi nilai Islam dan Pancasila membantu memperkuat sikap moderat dan toleran di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Pemahaman ini juga menuntut adanya pendidikan yang holistik dan interdisipliner di perguruan tinggi. Kurikulum harus mengakomodasi nilai-nilai religius dan kebangsaan secara seimbang, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menginternalisasi keduanya secara utuh. Lebih jauh, harmonisasi nilai ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan fondasi moral yang kuat, bangsa

⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 87

Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik secara bijaksana dan beradab.

Prinsip-prinsip Islam yang humanis dan universal sangat kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini membuka ruang dialog dan sinergi antara tradisi keagamaan dan modernitas kebangsaan.

Namun, harmonisasi tidak berarti tanpa tantangan. Praktik kehidupan sosial dan politik seringkali menghadirkan ketegangan antara interpretasi agama yang konservatif dengan tuntutan negara yang plural. Oleh karena itu, dialog terus-menerus dan pendidikan kritis diperlukan untuk menjaga keseimbangan ini.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, negara harus mendukung upaya integrasi nilai-nilai ini melalui kebijakan yang mengedepankan inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman, baik agama maupun budaya. Selain itu, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi berperan penting sebagai agen perubahan yang mendorong internalisasi nilai Islam dan Pancasila secara konstruktif dan kontekstual. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa juga harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai tersebut agar dapat menjadi agen perdamaian dan pembangunan yang efektif. Dengan pemahaman harmonisasi nilai Islam dan Pancasila yang kokoh, diharapkan tercipta masyarakat yang tidak hanya cerdas dan maju secara teknologi, tetapi juga bermoral dan berbudaya luhur.

Sebagai kesimpulan, harmonisasi nilai Islam dan Pancasila merupakan fondasi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemahaman yang tepat dan aplikatif akan

memperkuat integrasi nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Dengan demikian, perguruan tinggi harus terus menjadi tempat strategis dalam membangun pemahaman ini melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya ini sangat penting dalam mengawal masa depan bangsa yang berkeadaban dan bermartabat.

B. Pandangan Tokoh Islam Indonesia Terhadap Relasi Islam dan Pancasila

Hubungan antara Islam dan Pancasila telah menjadi perdebatan yang hangat sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Namun, sejumlah tokoh Islam Indonesia terkemuka menawarkan perspektif yang memberikan gambaran harmonis dan konstruktif mengenai hubungan keduanya. Di antara tokoh yang berpengaruh adalah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Buya Hamka. Mereka menyumbangkan pemikiran penting yang memperlihatkan bahwa Islam dan Pancasila tidak harus berada dalam posisi konflik, melainkan dapat saling melengkapi dalam kerangka kebangsaan.

Nurcholish Madjid, atau akrab disapa Cak Nur, dikenal sebagai intelektual Islam yang mendorong modernisasi Islam dan keterbukaan beragama. Dalam pemikirannya, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa Pancasila bukanlah ideologi sekuler yang memisahkan agama dari negara, melainkan konsensus moral yang bisa dirangkul oleh umat Islam.¹¹ Ia melihat bahwa nilai-nilai

¹⁰ Azyumardi Azra, *Negara dan Islam: Pergulatan Politik Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 204

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 276.

universal yang terkandung dalam Pancasila—seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan—sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil’alamin. Oleh karena itu, menurut Cak Nur, umat Islam harus menerima Pancasila sebagai dasar negara yang mendukung kebersamaan dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

Nurcholish juga menolak konsep “Islam sebagai ideologi negara” karena menurutnya hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan eksklusivitas. Ia mengajukan gagasan “Islam Yes, Partai Islam No” yang berarti Islam sebagai agama tetap harus ditegakkan, tapi tidak perlu dipolitisasi dalam bentuk partai politik Islam yang bisa memperuncing perpecahan¹². Pancasila, dalam kerangka tersebut, berfungsi sebagai perekat nasional yang mengakomodasi keanekaragaman.

Selanjutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan pandangan yang sangat progresif mengenai relasi Islam dan Pancasila. Gus Dur menegaskan bahwa Pancasila sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal penghormatan terhadap pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia¹³. Sebagai seorang ulama dan pemimpin Nahdlatul Ulama, Gus Dur melihat Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran, yang mendorong umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan berbagai kelompok lain dalam masyarakat.

Gus Dur bahkan menyatakan bahwa Pancasila memberikan kerangka yang kuat bagi kehidupan beragama di Indonesia karena

¹² Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 280

¹³ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 213

ia mengakui keberagaman dan melindungi kebebasan beragama¹⁴. Menurutnya, Pancasila merupakan solusi terbaik untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus menjamin hak-hak seluruh umat beragama agar bisa beribadah sesuai keyakinannya tanpa diskriminasi. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur mengkritik sikap eksklusif dan intoleran yang bertentangan dengan spirit Pancasila dan ajaran Islam yang rahmat.

Sementara itu, Buya Hamka sebagai ulama, sastrawan, dan tokoh intelektual Islam juga mengemukakan pandangan yang harmonis tentang hubungan Islam dan Pancasila. Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya, Hamka menjelaskan bahwa sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan yang juga menjadi dasar utama ajaran Islam¹⁵. Baginya, Pancasila dan Islam memiliki titik temu dalam hal keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya moralitas dalam kehidupan berbangsa.

Hamka juga menegaskan bahwa nilai-nilai sosial dalam Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan beradab adalah nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, dia memandang Pancasila bukan sebagai ancaman terhadap Islam, melainkan sebagai pedoman berbangsa yang dapat diterima oleh umat Islam¹⁶. Buya Hamka mengajak umat Islam untuk aktif

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 56.

¹⁵ Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 88

¹⁶ Hamka, *Tasawuf Modern: Islam dan Toleransi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 102.

berpartisipasi dalam pembangunan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan ajaran agama.

Ketiga tokoh tersebut, meskipun memiliki latar belakang dan gaya pemikiran yang berbeda, sama-sama berupaya membangun relasi yang konstruktif antara Islam dan Pancasila. Mereka sepakat bahwa keduanya dapat berjalan beriringan demi menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman¹⁷.

Pendekatan yang diajukan oleh ketiganya juga relevan untuk menjawab tantangan modernitas, di mana masyarakat Indonesia menghadapi masalah pluralitas agama dan budaya, serta dinamika politik yang kompleks. Integrasi nilai Islam dan Pancasila, menurut mereka, merupakan landasan moral dan ideologis yang kokoh untuk menghadapi tantangan tersebut.

Melalui pemikiran Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan payung ideologi yang bisa merangkul seluruh elemen bangsa tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemikiran mereka membuka ruang untuk membangun kurikulum dan suasana kampus yang menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan berwawasan kebangsaan.

Pemikiran para tokoh ini menjadi inspirasi penting untuk terus menguatkan integrasi antara nilai Islam dan Pancasila. Hal ini tidak hanya relevan bagi perkembangan pendidikan tinggi, tetapi juga sangat vital dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia di masa depan.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Negara dan Islam: Pergulatan Politik Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 147.

C. Integrasi Pemikiran Tokoh Islam Tersebut dalam Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Pendidikan karakter menjadi salah satu aspek krusial dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang beretika, bertanggung jawab, dan berwawasan kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Islam seperti Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka, menjadi sumber inspirasi yang sangat relevan untuk membangun pendidikan karakter yang kuat dan bermakna.

Nurcholish Madjid menekankan pentingnya Islam yang terbuka, moderat, dan mengedepankan nilai kemanusiaan universal. Dalam pendidikan tinggi, gagasan ini dapat diimplementasikan dengan mengembangkan kurikulum yang mendorong mahasiswa untuk memahami Islam secara kontekstual dan inklusif. Hal ini bertujuan membentuk karakter mahasiswa yang toleran dan menghargai perbedaan dalam masyarakat multikultural Indonesia.¹⁸

Implementasi pemikiran Nurcholish dalam pendidikan karakter juga dapat berupa penguatan dialog antaragama dan interaksi sosial yang harmonis di lingkungan kampus. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan rasa saling pengertian dan menghargai keragaman sebagai kekayaan bangsa.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm.185.
Jurnal EDUVIA Vol. 2 No. 1 Juni 2026

Sementara itu, Gus Dur dengan pandangan pluralismenya menekankan pentingnya sikap inklusif dan menghormati perbedaan dalam berbangsa. Pendidikan karakter di perguruan tinggi harus menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia, sebagaimana yang sering digagas oleh Gus Dur¹⁹. Hal ini menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk menjadi agen perdamaian dan pembangunan sosial.

Dalam aspek praktis, nilai-nilai Gus Dur dapat diaplikasikan melalui program-program ekstrakurikuler yang menumbuhkan kepedulian sosial dan empati terhadap sesama mahasiswa, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau budaya. Selain itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan Pancasila dapat menjadi wahana penting bagi internalisasi nilai-nilai kebangsaan.

Buya Hamka, yang dikenal dengan keteguhan imannya dan kecintaannya pada kebudayaan Indonesia, memberikan kontribusi pemikiran mengenai integrasi nilai agama dan kebangsaan dalam pendidikan karakter. Menurut Hamka, nilai moral dan spiritual dari Islam harus menjadi landasan utama dalam membangun karakter bangsa²⁰. Oleh karena itu, pendidikan tinggi perlu menanamkan kesadaran spiritual yang seimbang dengan pengembangan intelektual.

Dengan demikian, pendidikan karakter harus mengakomodasi dimensi spiritual agar mahasiswa tidak hanya

¹⁹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (hlm. 312

²⁰ Hamka, *Tasawuf Modern: Islam dan Toleransi*, hlm. 118

cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kedalaman moral dan keimanan yang membimbing perilaku positif. Lebih jauh, integrasi pemikiran ketiga tokoh ini menegaskan perlunya pendidikan karakter yang berorientasi pada pembentukan watak kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila dan nilai-nilai Islam yang moderat. Ini penting mengingat tantangan pluralitas dan dinamika sosial politik yang semakin kompleks di era globalisasi.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan budaya harus berperan aktif dalam merancang metode pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia²¹.

Salah satu bentuk konkret adalah pengembangan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kampus sehari-hari. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan Pancasila dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut secara langsung. Misalnya, kegiatan sosial yang menumbuhkan sikap gotong royong, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Pendekatan multidisipliner juga dapat digunakan dalam pendidikan karakter dengan melibatkan berbagai fakultas dan disiplin ilmu untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai bidang keilmuan. Pentingnya peran dosen dan tenaga

²¹ Azyumardi Azra, *Negara dan Islam: Pergulatan Politik Islam Indonesia*, hlm. 203

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai tersebut juga tidak bisa diabaikan. Dosen harus menjadi teladan dan fasilitator yang mampu menghubungkan teori dengan aplikasi nilai-nilai moral dan kebangsaan di dunia nyata.

Dalam konteks pengembangan karakter, penanaman sikap kritis dan reflektif sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memahami dan menginternalisasi nilai Islam dan Pancasila secara mendalam, bukan sekadar hafalan normatif²².

Kegiatan diskusi, seminar, dan dialog antaragama dapat menjadi media efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tersebut. Hal ini sekaligus membantu membangun sikap toleransi dan empati yang kuat. Pemikiran Gus Dur yang menonjolkan pluralisme juga menuntut adanya ruang dialog yang inklusif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga setiap kelompok mahasiswa merasa dihargai dan memiliki tempat dalam kerangka kebangsaan.

Pengembangan karakter berbasis integrasi nilai Islam dan Pancasila juga harus didukung oleh kebijakan kampus yang ramah keberagaman dan anti-diskriminasi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan karakter tidak boleh terlepas dari konteks sosial budaya Indonesia yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila.

Pendidikan karakter yang dibangun dari pemikiran ketiga tokoh ini juga membantu menghindarkan mahasiswa dari radikalisme dan ekstremisme yang berpotensi memecah belah

²² Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 198
Jurnal EDUVIA Vol. 2 No. 1 Juni 2026

bangsa. Perguruan tinggi dapat mengembangkan program khusus yang fokus pada penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama sebagai bagian dari pembinaan karakter mahasiswa. Pelibatan alumni dan tokoh masyarakat dalam kegiatan pendidikan karakter juga dapat memperkuat pesan moral dan nasionalisme yang ingin dibangun.

Pendidikan karakter yang berakar pada pemikiran tokoh Islam ini harus menjadikan mahasiswa mampu bersikap responsif terhadap isu-isu sosial dan keagamaan secara proporsional dan bijaksana. Dengan integrasi pemikiran tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.

Dalam pelaksanaannya, perlu dibuat modul atau buku panduan pendidikan karakter yang memuat ajaran Islam moderat dan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan penelitian dan kajian ilmiah yang menelaah hubungan Islam dan Pancasila sebagai basis pendidikan karakter.

Sikap moderat, toleran, dan inklusif yang dibangun melalui pendidikan karakter ini akan memperkuat demokrasi dan menumbuhkan kesadaran sosial mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Selain itu, pendidikan karakter yang berintegrasi ini juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas kebangsaan dan keagamaan.

Secara keseluruhan, integrasi pemikiran Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka dalam pendidikan karakter di perguruan

tinggi bukan hanya relevan tetapi juga sangat strategis dalam membangun bangsa yang kuat, beradab, dan harmonis. Upaya ini menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan moral yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Islam dan Pancasila. Di masa depan, penguatan pendidikan karakter berbasis integrasi ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah, kampus, dan masyarakat agar memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

D. Tantangan Ideologis dan Kultural dalam Integrasi Nilai Islam dan Pancasila di Kampus

Integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan ideologis dan kultural yang cukup kompleks. Perguruan tinggi sebagai ruang akademik dan sosial yang beragam, tidak terlepas dari dinamika perbedaan pandangan, kepentingan, dan identitas yang terkadang berpotensi menimbulkan konflik.

Salah satu tantangan ideologis utama adalah perbedaan interpretasi terhadap Islam itu sendiri. Sebagian kelompok mengusung pandangan Islam yang konservatif dan eksklusif, sementara kelompok lain mengadvokasi Islam yang lebih moderat dan inklusif. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam implementasi nilai-nilai Islam yang selaras dengan Pancasila, yang mengedepankan pluralisme dan toleransi¹.

Selain itu, munculnya kelompok-kelompok radikal di lingkungan kampus menjadi salah satu hambatan serius. Kelompok

ini menolak nilai-nilai Pancasila yang dianggap bertentangan dengan pandangan mereka tentang Islam, sehingga berpotensi mengganggu harmoni dan kebersamaan antar mahasiswa serta civitas akademika.

Tantangan kultural juga tidak kalah penting. Perguruan tinggi adalah tempat bertemunya berbagai latar belakang budaya, suku, dan agama. Perbedaan ini sering kali menimbulkan gesekan sosial, terutama bila tidak dikelola dengan baik. Nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa harus bisa mengakomodasi keberagaman budaya ini agar tidak menjadi sumber konflik²³.

Konflik budaya juga muncul dari ketidaksesuaian praktik keagamaan dengan norma sosial yang ada di kampus. Misalnya, perbedaan cara beribadah, pemahaman tentang kebebasan beragama, dan tradisi budaya yang bertabrakan dengan nilai-nilai Islam tertentu.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa maupun staf pengajar tentang pentingnya integrasi nilai Islam dan Pancasila menjadi hambatan lain. Kurikulum yang belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai ini secara komprehensif menyebabkan lemahnya internalisasi nilai dalam kehidupan kampus sehari-hari²⁴.

²³ Komaruddin Hidayat, *Pancasila dan Tantangan Kebangsaan* (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 123

²⁴ M. Quraish Shihab, *Islam dan Toleransi* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 112

Fenomena politisasi agama juga menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi. Dalam beberapa kasus, identitas agama dijadikan alat politik yang memperkeruh suasana di lingkungan kampus dan menghambat upaya membangun harmonisasi nilai.

Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas di kampus juga sering muncul akibat miskomunikasi dan stereotip yang melekat. Ini menuntut adanya upaya dialog dan pembinaan yang berkelanjutan agar integrasi nilai dapat berjalan lancar.

Tantangan lainnya adalah globalisasi dan modernisasi yang membawa arus budaya luar yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Mahasiswa yang terpapar budaya global harus dibekali dengan wawasan yang mampu menyaring dan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Islam moderat⁴.

Ketidakseimbangan antara kebebasan akademik dan penguatan nilai-nilai moral dan agama juga menjadi persoalan. Kebebasan yang berlebihan tanpa kontrol nilai bisa menyebabkan degradasi moral dan ketidakharmonisan sosial.

Peran dosen dan civitas akademika sangat strategis dalam menangani tantangan ini. Mereka harus mampu menjadi mediator dan fasilitator dalam proses integrasi nilai-nilai tersebut, baik melalui pengajaran maupun pengelolaan lingkungan kampus yang kondusif. Kebijakan kampus juga harus mendukung integrasi nilai melalui program-program yang mengedepankan toleransi, dialog antaragama, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya.

Selain itu, pembentukan organisasi mahasiswa yang inklusif dan tidak eksklusif berbasis agama atau etnis dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat persatuan. Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Islam dan Pancasila juga harus menjadi prioritas agar mahasiswa mampu menghadapi tantangan ideologis dan kultural secara bijaksana.

Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi medan pertempuran nilai. Kampus perlu mengawasi dan mengedukasi mahasiswa agar tidak terjebak dalam informasi negatif yang bisa mengganggu integrasi nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan²⁵

Secara keseluruhan, tantangan ideologis dan kultural dalam integrasi nilai Islam dan Pancasila di perguruan tinggi memerlukan pendekatan multidimensional dan kolaboratif. Keterlibatan semua pihak pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan agar integrasi nilai ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Strategi penguatan dialog lintas kelompok, pengembangan kurikulum kontekstual, serta pembinaan karakter berbasis nilai-nilai luhur menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan ini. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, perguruan tinggi dapat menjadi tempat yang harmonis bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus penjaga nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.

²⁵ Dedi Supriadi, *Media Sosial dan Radikalisme* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 89

E. Strategi Implementasi Integrasi Nilai Islam dan Pancasila dalam Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan berjiwa kebangsaan. Oleh sebab itu, strategi implementasi integrasi nilai Islam dan Pancasila harus menyentuh seluruh aspek kehidupan kampus, mulai dari proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, hingga budaya dan tata kelola institusi.

1. Penguatan Kurikulum Berbasis Nilai

Mengintegrasikan nilai Islam dan Pancasila ke dalam kurikulum tidak hanya sebatas penambahan mata kuliah, tetapi juga pada cara pengajaran dan pengembangan materi yang kontekstual. Misalnya, dalam mata kuliah agama, dosen dapat mengaitkan ajaran Islam dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan. Sebaliknya, dalam mata kuliah kewarganegaraan, mahasiswa diberi ruang untuk memahami kontribusi Islam dalam pembentukan karakter bangsa. Kurikulum yang kaya akan dialog antar-nilai ini akan membantu mahasiswa memahami bahwa Islam dan Pancasila bukan dua entitas yang terpisah, melainkan dapat berjalan seiring.

2. Kegiatan Ekstrakurikuler yang Mendukung

Di luar kelas, kegiatan seperti diskusi lintas agama, kerja sosial, atau kegiatan seni budaya berbasis nilai kebangsaan dan keagamaan dapat memperkuat internalisasi nilai. Misalnya, forum lintas agama di kampus bisa menjadi wadah mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk saling

mengenal, membangun toleransi, dan mempraktekkan nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari.

3. Peningkatan Kapasitas Dosen dan Staf

Dosen dan tenaga kependidikan perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai pentingnya integrasi nilai. Pelatihan dan workshop tentang metode pengajaran nilai dan cara membangun suasana kelas yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Seorang dosen yang menghayati nilai Islam dan Pancasila secara utuh akan lebih mampu menginspirasi mahasiswa melalui contoh nyata.

4. Lingkungan Kampus yang Inklusif dan Toleran

Membangun lingkungan yang mendukung keberagaman menjadi faktor penting agar nilai-nilai Islam dan Pancasila hidup dalam interaksi sehari-hari. Kampus harus memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau latar belakang lain. Perayaan hari besar keagamaan secara bergiliran dan pembentukan komunitas inklusif bisa menjadi wujud nyata penghormatan terhadap keberagaman.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Di era digital, kampus dapat memanfaatkan media sosial dan platform online untuk menyebarkan konten pendidikan nilai. Webinar tentang Islam dan Pancasila, podcast tentang tokoh Islam moderat, dan kanal Youtube yang membahas pluralisme bisa menjangkau mahasiswa secara luas dan menarik perhatian mereka dengan cara yang relevan.

6. Pengembangan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Mendorong mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian mengenai integrasi nilai Islam dan Pancasila membantu memperkuat landasan akademik sekaligus memberikan solusi atas permasalahan di lapangan. Publikasi hasil penelitian di jurnal dan seminar juga meningkatkan kesadaran akademik tentang pentingnya integrasi nilai ini.²⁶

7. Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal

Kerja sama dengan kementerian, ormas keagamaan, dan organisasi sosial memberi tambahan sumber daya dan perspektif yang dapat memperkaya program integrasi nilai. Kegiatan bersama seperti seminar nasional, pelatihan kepemimpinan, dan kampanye sosial berbasis nilai Islam dan Pancasila memperluas jangkauan pengaruh kampus.

8. Pembentukan Unit Khusus Pengawas dan Penggerak

Unit ini bertugas memantau pelaksanaan program integrasi nilai, mengidentifikasi hambatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, kualitas implementasi program dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

9. Penguatan Budaya Akademik

Menumbuhkan budaya yang menghargai perbedaan dan menempatkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok sangat penting. Hal ini harus dimulai dari pimpinan kampus hingga

²⁶ M. Quraish Shihab, *Islam dan Toleransi* hlm. 112

mahasiswa, agar nilai-nilai Islam dan Pancasila menjadi bagian hidup yang nyata.

10. Pendekatan Holistik dan Humanistik dalam Pendidikan

Pendidikan yang menyentuh aspek intelektual, emosional, dan spiritual menjadikan mahasiswa tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki rasa empati dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, mereka akan mampu menjadi agen perubahan yang mengintegrasikan nilai Islam dan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam konteks pemikiran Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka, strategi ini tidak hanya menekankan aspek formal pendidikan, tapi juga pembentukan jiwa dan karakter manusia Indonesia yang harmonis antara agama dan kebangsaan.

KESIMPULAN

Pembahasan pada bab ini menegaskan bahwa integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam pendidikan tinggi merupakan suatu kebutuhan strategis untuk memperkuat karakter kebangsaan sekaligus memperkaya nilai spiritual mahasiswa. Pemahaman harmonisasi nilai Islam dan Pancasila harus dilandasi pada kesadaran bahwa kedua nilai tersebut saling melengkapi dan dapat berjalan beriringan demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Pandangan tokoh Islam Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memandang hubungan Islam dan Pancasila bukan sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat disintesis untuk membangun peradaban

Indonesia yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. Ketiga tokoh ini menekankan pentingnya pluralisme, dialog terbuka, dan semangat kebangsaan sebagai pondasi integrasi nilai.

Dalam konteks pendidikan karakter di perguruan tinggi, gagasan ketiga tokoh tersebut dapat diterjemahkan menjadi program-program pengembangan karakter mahasiswa yang menekankan sikap terbuka, toleran, dan patriotik. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai Islam dan Pancasila tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang harmonis dengan nilai kebangsaan dan spiritualitas Islam yang moderat.

Namun, proses integrasi ini menghadapi tantangan ideologis dan kultural yang nyata, seperti sikap eksklusif, resistensi terhadap nilai kebangsaan, dan konflik antar kelompok di lingkungan kampus. Pemikiran Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Hamka menekankan perlunya pendidikan dan dialog yang berkelanjutan sebagai solusi utama untuk mengatasi hambatan tersebut, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan keberagaman.

Strategi implementasi integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam pendidikan tinggi harus bersifat holistik dan sistematis. Langkah-langkah seperti penguatan kurikulum, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan dosen, penciptaan lingkungan kampus inklusif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan. Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi dapat menjadi wahana yang efektif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beriman, dan berwawasan kebangsaan.

Secara keseluruhan, integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam pendidikan tinggi bukan hanya sekedar proses akademik, melainkan juga upaya mendasar untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kerangka keislaman yang rahmatan lil ‘alamin dan spirit Pancasila sebagai dasar negara. Pendekatan ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun masa depan Indonesia yang harmonis, maju, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Makna dan Tujuan Hidup Beragama*. Jakarta: Mizan, 2000.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hamka. *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hidayat, Komaruddin. *Pancasila dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Mizan, 2010.
- Latif, Yudi. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara dan Ideologi Bangsa*. Jakarta: Kompas, 2012.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1993.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Islam dan Toleransi*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Supriadi, Dedi. *Media Sosial dan Radikalisme*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Paramadina, 1999.